



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	3 (tiga)
Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).
Hari, Tanggal	:	Kamis, 1 Februari 2024
Pukul	:	11.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M,B,A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Menerima Audiensi dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).
Hadir	:	1. 2 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Anggota Komisi V DPR RI, Bapak Mulyadi; 3. Ketua Umum Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Bapak Muhsin, S.IP; 4. Sekretaris Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Bapak Azet Basuni; Beserta rombongan.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) pada pukul 11.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 1 Februari 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Karukunan Warga Puncak/Aliansi Masyarakat Bogor Selatan terkait permasalahan sengketa lahan yang melibatkan BUMN PTPN VIII dan Perum Perhutani dengan masyarakat di Kawasan Tugu, Puncak, Bogor Selatan Provinsi Jawa Barat, serta

beberapa permasalahan lain yang dinilai meresahkan warga. Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain :

- a. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Dan Program Kulin KK:
 - HGU Perkebunan Teh;
 - Hutan Lindung Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP);
 - Hutan Pangkuan Desa dan Kawasan Perhutani;
 - Monitoring Evaluasi Program Kulin Kk Perhutanan;
 - Sosial KLH;
 - b. Pembangunan Yang Masif / Pembangunan Dan Perijinan:
 - Marak pembangunan tanpa mengantongi ijin;
 - Lemahnya pengawasan dan penindakan;
 - Disinyalir banyak oknum dalam perijinan;
 - c. Akibat dari permasalahan tersebut berdampak pada terganggunya nilai Sosial Budaya lokal yang diakibatkan:
 - Keberadaan imigran dipuncak dinilai meresahkan masyarakat;
 - Pemerintah kurang memperhatikan terkait kehidupan sosial warga puncak, kepadatan permukiman penduduk dipuncak saat ini perlu mendapat perhatian serius, kurangnya ruang terbuka hijau dipermukiman-permukiman warga sehingga anak-anak kesulitan untuk bermain terlebih saat ini akses-akses ke sungai banyak menjadi area private, menjadi persoalan sosial dipuncak semakin kompleks;
 - Keberadaan situs-situs tempat bersejarah serta tempat-tempat yang dikeramatkan/disakralkan oleh warga lokal, kurang mendapat perhatian dinas terkait;
2. Karukunan Warga Puncak/ Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mengharapkan adanya Solusi dari Komisi VI DPR RI untuk penyelesaian masalah tersebut, mengingat masalah yang terjadi terkait erat dengan BUMN terutama PTPN VIII dan Perum Perhutani.
 3. Terkait dengan permasalahan yang disampaikan Karukunan Warga Puncak/ Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, maka Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti dengan menjadwalkan pertemuan/rapat dengan PTPN VIII, PT Jasa Marga, dan Perum Perhutani guna mencari Solusi dalam penyelesaian masalah tersebut pada masa sidang yang akan datang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.26 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A

A-103